RENCANA KERJA
(RENJA)



DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

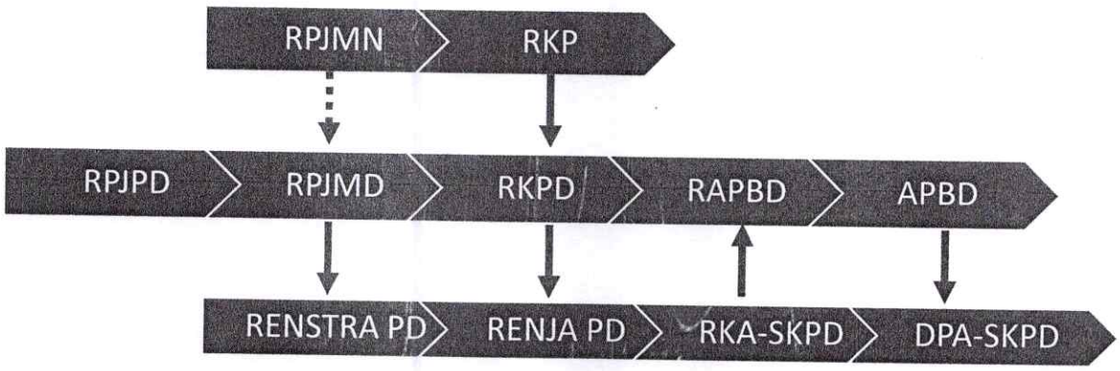
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- ▪▪▪▶ diperhatikan
- ▯ dipedomani dan/atau diacu
- ⟶ dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
50. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-1 (pertama) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1,02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								-		

1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	81,0	**Nilai**	**78,4**			**#DIV/0!**	**80,5**	-	-	**Nilai**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranglkat Daerah yang disusun**	1	**dokumen**	**10**	**2**	**2**	**100,00**	**4**	12	12,0	**dokumen**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	0	0	0		1	-	-	dokumen
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan	10	2	2	**100,00**	2	12	6,0	laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	0	0	0		1	-	-	laporan
1.02.01.2.02	**Admimistrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2163	**dokumen**	**12.197**	**1.200**	**2.326**	**193,83**	**2.037**	14.523	#DIV/0!	**dokumen**

1.02.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.090	orang / bulan	12.197	1.200	1.060	**88,33**	1.090	13.257	12,2	orang / bulan
1.02.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -RSD Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	512	orang / bulan	0	0	705	**#DIV/0!**	465	705	1,4	orang / bulan
1.02.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -RSD Kertosono	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	561	orang / bulan	0	0	561	**#DIV/0!**	482	561	1,0	orang / bulan
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	4	**dokumen**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**4**	-	-	**dokumen**
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	0	0	0	**#DIV/0!**	4	-	-	laporan
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	4	**dokumen**	**291**	**20**	**20**	**100,00**	**20**	311	77,8	**dokumen**
1.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-		1	0	0	0	-	1	0	orang

1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yg mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	orang	290	20	20	**100,00**	20	310	10,3	orang
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	288	**paket**	**73**	**240**	**240**	**100,00**	**250**	313	1,1	**paket**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi loistrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22	paket	20	20	20	**100,00**	20	40	1,8	paket
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22		0	0	0	**0**	10	-	-	paket
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	12	paket	1	10	10	**100,00**	10	11	0,9	paket
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat,tamu dan harian pegawai	12	paket	8	10	10	**100,00**	10	18	1,5	paket
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	110	paket	4	100	100	**100,00**	100	104	0,9	paket

1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	55	dokumen	0	50	50	**100,00**	50	50	0,9	dokumen
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	laporan	40	50	50	**100,00**	50	90	1,6	laporan
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	34	**unit**	**127**	**63**	**63**	**100,00**	**30**	190	5,6	
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		-	-	-	-	-		-	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	unit	8	-	-	-	2	4	-	unit
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	unit	65	0	0	**0**	3	65	16,3	unit

1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakam	27	unit	52	63	63	**100,00**	25	115	4,3	unit
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-		2	0	0	**0**		2	#DIV/0!	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36**	**dokumen**	**36**	**36**	**36**	**100,00**	**36**	72	2,0	**dokumen**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	12	12	**100,00**	12	24	2,0	laporan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12	laporan	12	12	12	**100,00**	12	24	2,0	laporan
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	12	12	**100,00**	12	24	2,0	laporan
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	91	**unit**	**169**	**130**	**93**	**71,54**	**85**	262	2,9	**unit**

1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	unit	0	20	15	**75,00**	9	15	1,4	unit
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya	57	unit	60	50	30	**60,00**	54	90	1,6	unit
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	unit	69	20	15	**75,00**	20	84	3,8	unit
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	1	unit	2	20	15	**75,00**	2	17	17,0	unit
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	unit	38	20	18	**90,00**		56	#DIV/0!	unit
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah unit yang telah ditingkatkan pelayanannya**	130		**2**	**2**	**2**	**100,00**	**22**	4	0,0	

X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bagor	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1		-	unit
X.XX.01.2.10.0002	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baron	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0003	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Berbek	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0004	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gondang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0005	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jatikalen	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0006	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kertosono	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit

X.XX.01.2.10.00 07	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lengkong	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.00 08	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Loceret	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.00 09	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nganjuk	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.00 10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ngetos	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.00 11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ngluyu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.00 12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nggronggot	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit

X.XX.01.2.10.0013	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pace	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0014	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Patianrowo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0015	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Prambon	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0016	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rejoso	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0017	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sawahan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0018	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sukomoro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit

X.XX.01.2.10.0019	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanjunganom	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
X.XX.01.2.10.0020	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wilangan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0	0	0	**0**	1	-	-	unit
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD – RSD Nganjuk	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	87	unit	1	1	1	**100,00**	1	2	0,0	unit
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD – RSD Kertosono	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	23	unit	1	1	1	**100,00**	1	2	0,1	unit
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. Prosentase SPM yang memenuhi target**	**40**	**Persen**	**811.033**	**1.639.928**	**1.124.874**	**68,59**	**966.477**	1.935.907	48.397,7	**Persen**
		2. Prosentase Fasyankes terakreditasi	**70**	**Persen**							-	**Persen**

		3. Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	**80**	**Persen**							-	**Persen**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Fasyankes terakreditasi**	70	**Persen**	**253**	**138**	**135**	**97,83**	**88**	388	5,5	**Persen**
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2	unit	1	1	1	**100,00**	2	2	1,0	unit
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alkes dan SDM agar Sesuai Standar	3		2	1	1	**100,00**	3	3	1,0	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM yang sesuai standar	4		1	0	0	**#DIV/0!**	4	1	0,3	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alkes yg telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeiharaan oleh Puskesmas	3	unit	4	1	1	**100,00**	3	5	1,7	unit

1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alkes yg telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeiharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	unit	4	8	7	**87,50**	10	11	1,1	unit
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas di Kab. Nganjuk	-	unit	-	1	-	-	-		-	unit
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	4		12	-	-	-	4	12	3,0	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10	unit	8	6	5	**83,33**	-	13	1,3	unit
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mcdik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Alat Kesehatan Lainnya	8	unit	159	80	80	**100,00**	8	239	29,9	unit
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan PemeliharaanAlat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	8		-	-		-	6		-	

1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	20	paket	30	30	30	**100,00**	15	60	3,0	paket
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12	paket	8	10	10	**100,00**	10	18	1,5	paket
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	10	unit	4	-		-	8	4	0,4	unit
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	unit	-	-		-	-		#DIV/0!	unit
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinkes	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara sesuai Standar	14	unit	0	-	-	-	10	#VALUE!	#VALUE !	unit
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.	8	paket	20	-	-	-	5	#VALUE!	#VALUE !	paket

1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Prosentase SPM yang memenuhi target**	40		**810.730**	**1.639.776**	**1.124.698**	**68,59**	**966.359**	1.935.428	48.385,7	
		2.Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	80,0								-	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinkes	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	137.773	orang	11.838	15.400	11.916	**77,38**	13.773	23.754	0,2	orang
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dinkes	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	13.167	orang	12.567	14.700	12.351	**84,02**	13.167	24.918	1,9	orang
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dinkes	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.837	orang	12.271	14.000	12.138	**86,70**	12.837	24.409	1,9	orang
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dinkes	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	57.715	orang	46.435	57.574	56.118	**97,47**	57.715	102.553	1,8	orang
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dinkes	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	10.500	orang	99.500	127.488	134.392	**105,42**	10.500	233.892	22,3	orang

1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif Puskesmas dinkes	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	701.671	orang	373342	658.663	524.257	**79,59**	681.234		-	orang
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dinkes	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	15.521	orang	106.146	191.676	160.978	**83,98**	15.521	267.124	17,2	orang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi dinkes	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	95.117	orang	90038	382.653	158.273	**41,36**	92.347		-	orang
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus dinkes	Jumlah penderita diabeteus melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.359	orang	22247	22.109	22.157	**100,22**	22.679		-	orang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dinkes	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan iwa berat sesuai standar	3.113	orang	2.809	2.022	2.024	**100,09**	2.830	4.833	1,6	orang
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dinkes	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	7.715	orang	4.407	7.204	8.623	**119,70**	7.014	13.030	1,7	orang

1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	23.724	orang	19.607	17.323	18.563	**107,16**	21.568	38.170	1,6	orang
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai Standar	41	dokumen	5	35	35	**100,00**	38	40	1,0	dokumen
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayana Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana Sesuai Standart	4	dokumen	-	5	5	**100,00**	4	-	-	dokumen
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7	dokumen	6	2	2	**100,00**	6	8	1,1	dokumen
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6	dokumen	27	4	4	**100,00**	4	31	5,2	dokumen
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	dokumen	61	4	4	**100,00**	4	65	13,0	dokumen

1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	dokumen	3	1	1	**100,00**	4	4	1,0	dokumen
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	45	dokumen	50	5	5	**100,00**	40	55	1,2	dokumen
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29	dokumen	11	25	25	**100,00**	27	36	1,2	dokumen
1.02.02.2.03.21	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.084	orang	-	-	-	-	2.856		-	orang
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dinkes	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	185	orang	1	43	43	**100,00**	170	44	0,2	orang
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	dokumen	-	-	-	-	1	#VALUE!	#VALUE !	dokumen
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	288	dokumen	294	288	288	**100,00**	288	582	2,0	dokumen

1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	20	12	12	**100,00**	1	32	32,0	dokumen
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Dokumen Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	-	orang	-	127.551	1.435	**1,13**			-	orang
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dinkes	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang didistribusikan	41	paket	9	35	35	**100,00**	38	44	1,1	paket
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	9	dokumen	22	7	7	**100,00**	7	29	3,2	dokumen
1.02.02.2.02.30	Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	40	unit	-	-		-		#VALUE!	#VALUE !	unit
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (dinkes)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		4	-	-	-	-	-	-	

1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Bagor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		33	33	**100,00**	3	33	11,0	dokumen
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Puskesmas Baron	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		195	195	**100,00**	3	195	65,0	dokumen
1.02.02.2.02.0035	Operasional Pelayanan Puskesmas Berbek	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		42	35	**83,33**	3	35	11,7	dokumen
1.02.02.2.02.0036	Operasional Pelayanan Puskesmas Gondang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		31	27	**87,10**	3	27	9,0	dokumen
1.02.02.2.02.0037	Operasional Pelayanan Puskesmas Jatikalen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		32	30	**93,75**	3	30	10,0	dokumen
1.02.02.2.02.0038	Operasional Pelayanan Puskesmas Kertosono	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		41	41	**100,00**	3	41	13,7	dokumen
1.02.02.2.02.0039	Operasional Pelayanan Puskesmas Lengkong	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		43	40	**93,02**	3	40	13,3	dokumen
1.02.02.2.02.0040	Operasional Pelayanan Puskesmas Loceret	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		54	40	**74,07**	3	40	13,3	dokumen
1.02.02.2.02.0041	Operasional Pelayanan Puskesmas Nganjuk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		29	23	**79,31**	3	23	7,7	dokumen
1.02.02.2.02.0042	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngetos	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		12	12	**100**	3	-	-	dokumen

1.02.02.2.02.0043	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngluyu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		30	30	**100,00**	3	30	10,0	dokumen
1.02.02.2.02.0044	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngronggot	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		47	159	**338,30**	3	159	53,0	dokumen
1.02.02.2.02.0045	Operasional Pelayanan Puskesmas Pace	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		30	30	**100**	3	-	-	dokumen
1.02.02.2.02.0046	Operasional Pelayanan Puskesmas Patianrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		41	31	**75,61**	3	31	10,3	dokumen
1.02.02.2.02.0047	Operasional Pelayanan Puskesmas Prambon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		41	40	**97,56**	3	40	13,3	dokumen
1.02.02.2.02.0048	Operasional Pelayanan Puskesmas Rejoso	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		12	12	**100,00**	3	12	4,0	dokumen
1.02.02.2.02.0049	Operasional Pelayanan Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		25	19	**76,00**	3	19	6,3	dokumen
1.02.02.2.02.0050	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukomoro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		30	30	**100**	3	-	-	dokumen
1.02.02.2.02.0051	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjunganom	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		63	63	**100,00**	3	63	21,0	dokumen
1.02.02.2.02.0052	Operasional Pelayanan Puskesmas Wilangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen		40	40	**100,00**	3	40	13,3	dokumen

1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	120	dokumen	8	100	100	**100,00**	110	108	0,9	dokumen
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kab/Kota	20	unit	20	20 -	100	**100**	20	-	-	unit
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	40	laporan	17	40	40	**100,00**	40	57	1,4	laporan
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon Wabah dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	dokumen	4	-	-	-	1	-	-	dokumen
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah PSC 119 Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan RS dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu	1	unit	0	1	1	**100,00**	1	1	1,0	unit
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga dinkes	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	12.000	keluarga	8.981	-	-	-	10.000	-	-	keluarga

1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis dinkes	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai standar	12.650	orang	-	-	-	-	1.150	-	-	orang
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang denganHIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	326	orang	-	-	-	-	296	-	-	orang
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5	orang	0	8	8	**100,00**	5	8	1,6	orang
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	3	tatanan	-	-	-	-	3	-	-	tatanan
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Prosentase SPM yang memenuhi target**	7		**5**	**6**	**6**	**100,00**	**6**	11	1,6	**dokumen**
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	dokumen	4	5	5	**100,00**		9	1,8	dokumen
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	dokumen	-	1	1	**100,00**	6	-	-	dokumen

1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat /Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1	dokumen	1	-	0	-	-	1	1,0	dokumen
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Fasyankes terakreditasi**	70	**persen**	**45**	**8**	**35**	**437,50**	**24**	80	1,1	**persen**
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	20	unit	20	27	27	**100,00**	20	47	2,4	unit
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4	dokumen	25	8	8	**100,00**	4	33	8,3	dokumen
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Prosentase tenakes yang memenuhi standar**	100	persen	**2.534**	**2.008**	1.780	**88,65**	**1.458**	4.314	43,1	persen
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Surat Ijin Praktik tenaga kesehatan**	1.200	dokumen	**2.142**	**1.004**	1.096	**109,16**	**1.200**	3.238	2,7	dokumen

1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen	1200	dokumen	-	1.000	1.092	**109,20**	-	-	-	dokumen
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	1.200	dokumen	2.142	4	4	**100,00**	1.200	2.146	1,8	dokumen
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil perencanaan,pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan**	8	dokumen	**122**	**4**	4	**100,00**	**8**	126	15,8	dokumen
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	dokumen	**0**	-	0	-	4	-	-	dokumen
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart dinkes	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	dokumen	120	-	-	-	-	-	-	dokumen

1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	dokumen	2	4	4	**100,00**	4	6	1,5	dokumen
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensiny**	250	orang	**270**	**1.000**	680	**68,00**	**250**	950	3,8	orang
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250	dokumen	270	1.000	680	**68,00**	250	950	3,8	dokumen
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi**	100	persen	159	275	275	**100,00**	**143**	434	4,3	persen
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Prosentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	100	persen	65	160	160	**100,00**	**32**	225	2,3	persen

1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	34	dokumen	60	30	30	**100,00**	32	90	2,6	dokumen
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	34	dokumen	0	100	100	**100,00**		100	2,9	dokumen
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	34	dokumen	5	30	30	**100,00**	32	35	1,0	dokumen

1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	54	dokumen	**60**	**50**	50	**100,00**	**52**	110	2,0	dokumen
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	54	dokumen	60	50	50	**100,00**	52	110	2,0	dokumen

1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM**	8	dokumen	**14**	**5**	5	**100,00**	**7**	19	2,4	dokumen
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	8		14	5	5	**100,00**	7	19	2,4	dokumen

1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan**	54		**20**	**60**	60	**100,00**	**52**	80	1,5	persen
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	54	dokumen	20	60	60	**100,00**	52	80	1,5	dokumen
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Keluarga Sehat**	0,5	**Indeks**	**267**	**10**	**10**	**100,00**	**72.088**	277	554,0	**indeks**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	4	**persen**	**255**	**3**	**3**	**100,00**	**3**	258	64,5	**persen**

1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	dokumen	255	3	3	**100,00**	3	258	64,5	dokumen
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	55	**persen**	7	**3**	**3**	**100,00**	**72.081**	10	0,2	**persen**
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	dokumen	7	3	3	**100,00**	4	10	2,5	dokumen
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	72.140	keluarga	-	-	-	-	72.077		-	keluarga

1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	4	**dokumen**	**5**	**4**	**4**	**100,00**	**4**	9	2,3	**dokumen**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	dokumen	5	4	4	**100,00**	4	9	2,3	dokumen

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ **91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Adanya Pegawai yang pensiun atau mutasi ke daerah lain	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Standart Pelayanan Minimal	Terdapat risiko kurang tercapainya target Standart Pelayanan Minimal	Menentukan sasaran indicator SPM dengan sasaran riil yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Program Peningkatan Kapasiatas Sumber Daya Manusia Kesehatan	88,65%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan tidak sesuai yang direncanakan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dilakukan secara daring
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produsen PIRT belum semuanya memiliki sertifikat makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi	Monev ke Produsen PIRT yang belum memiliki sertifikat makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	90%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan penyuluhan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan IV

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama

(core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Dinas Kesehatan												
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79,57%	77,11%	77,38 %	100%	100%	Dinas Kesehatan
2.	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,11%	85,29%	83,96 %	100%	100%	Dinas Kesehatan
3.	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,56%	87,43%	86,70 %	100%	100%	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
4.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74,64%	81,35%	97,47 %	100%	100%	Dinas Kesehatan
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,26%	75,73%	100 %	100%	100%	Dinas Kesehatan
6.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	23,52%	63,03%	81,37 %	100%	100%	Dinas Kesehatan
7.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,65%	58,93%	86,32 %	100%	100%	Dinas Kesehatan
8.	Persentase penderita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14,53%	34,45%	42,58 %	100%	100%	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar												
9.	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,08%	97,66%	100 %	100%	100%	Dinas Kesehatan
10.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,11%	88,70%	100 %	100%	100%	Dinas Kesehatan
11.	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	18,57%	41,15%	100 %	100%	100%	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
12.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105,5%	100%	100 %	100%	100%	Dinas Kesehatan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Dinas Kesehatan

1. Indikator SPM belum memenuhi target;
2. Belum semua penduduk terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan gedung dinkes

b. RSD NGANJUK

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana (Pembangunan Gedung)
    - Persiapan Relokasi
2. Pengembangan Layanan (Spesialisasi)
    - Pengembangan Layanan Onkologi, dokter hematologi onkologi
    - Pengembangan Pelayanan Jiwa
    - Klinik eksekutif/Praktek Sore
3. Pengembangan Aplikasi & SIM RS
    - Pengembangan SIM RS
    - Jaringan Internet Ter-centre
4. Promosi Kesehatan & Edukasi Rumah Sakit
    - Penyuluhan Masyarakat (studio Podcast & Media Sosial)
5. Pengembangan Lainnya
    - Pengembangan Green Hospital
    - Pengembangan Smart Hospital

c. RSD Kertosono

1. Optimalisasi pelayanan Rumah Sakit baik dari segi kondisi sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan Standar Nasional demi peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.
2. Optimalisasi SDM pemberi pelayanan beserta kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan untuk peningkatan pelayanan
3. Penambahan fasilitas pelayanan intensif dan poliklinik yang belum tersedia di Rumah Sakit seperti ICU, NICU, HCU, dan PICU yang sesuai dengan Standar Nasional serta poliklinik baru (Urologi, Kulit dan Kelamin, Jantung, dan lain-lain) pada pelayanan Rawat Jalan
4. Pengembangan Pelayanan Program Nasional (Ponek, Tuberculosis, HIV Aids, Stunting dan Wasting (Program Gizi) dan PKBRS) agar berjalan secara optimal.

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Dinas Kesehatan

1. Indikator SPM belum memenuhi target
   Hambatan :
   a. Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di FKTP masih ada yang belum memenuhi standar
   b. Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana, Obat, BMHP dan Alat kesehatan belum memenuhi standar
   c. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian SPM
   d. Indikator SPM tidak bisa tercapai dikarenakan penentuan sasaran menggunakan data proyeksi
2. Belum semua penduduk terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat
   Hambatan :
   a. Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin belum optimal
   b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar secara mandiri
3. Rehabilitasi dan pembangunan gedung dinkes

b. RSD NGANJUK

Permasalahan Internal :

Masalah - masalah yang menjadi prioritas yang perlu di lakukan penyelesaian adalah sebagai berikut:

1) SDM

- Sumber daya manusia yang tersedia tidak sesuai dengan perhitungan ABK.
- Kualifikasi SDM yang belum sesuai standar
- Penerapan standart kompetensi yang belum optimal mengakibatkan munculnya praktisi kesehatan yang kurang kompeten dibidangnya

2) Sarana Prasarana

- Keterbatasan ruang dan lahan yang ada untuk melakukan pengembangan pelayanan.
- Kondisi bangunan belum sesuai standar yang ditetapkan RS type B dan KRIS (Kelas Rawat Inap Standart) BPJS .
- Kurang memadainya fasilitas komunikasi dan telekomunikasi sebagai aspek utama penunjang pelayanan.
- Sebagian Alkes/Alked yang tersedia belum sesuai standar Rumah Sakit Type B

3) Finansial

- Billing system yang belum optimal sehingga berpengaruh pada Pendapatan Rumah Sakit

4) Pelayanan

- Sering terjadi komplain dari pasien terkait pelayanan yang dilakukan RSD Nganjuk

b. Permasalahan Eksternal

1) Pelanggan

- Ekspetasi pelanggan yang terlalu tinggi terhadap pelayanan yang diberikan Rumah Sakit

2) Penjamin

- Ketidakpastian dalam pembayaran klaim yang merupakan salah satu faktor penting berjalannya proses pelayanan.
- Kebijakan Penjamin/Pemerintah yang bisa merugikan Rumah Sakit/Pasien.
- BPJS dengan sistem rujukan online berjenjang, maka jumlah kunjungan pasien menurun, sehingga berdampak pada turunnya pendapatan
- BPJS dengan sistem pembayaran memakai tarip INA CDG'S, maka sulit untuk memprediksi klaim tagihan pasien BPJS. Sering terjadi tidak sesuai antara jumlah yang diajukan dengan realisasi Klaim dari Pihak Penjamin yang tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi pendapatan dan proses belanja

2.3.1. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**, pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, (Perangkat Daerah) memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-.. serta sasaran strategis daerah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.

5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.2. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

- Peningkatan anggaran dalam mendukung pencapaian Standart Pelayanan Minimal Kesehatan
- Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
- Pemenuhan standart tenaga kesehatan
- Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam pemenuhan tenaga BLUD Puskesmas
- Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung dinkes

b. RSD Nganjuk

a. Pada Faktor Pasien
   - Status Ekonomi Pasien
   - Kesadaran Sakit dan Kesadaran Berobat
   - Persepsi Pasien
   - Tingkat Kepuasan

b. Faktor Lingkungan Pasien
   - Budaya
   - Pengaruh Kelompok/ Second Opinion
   - Prevalensi Penyakit aya Hidup

c. Faktor Rumah Sakit
   - Kualitas Pelayanan
   - Tarif RSD
   - Perilaku Petugas

d. Faktor Pesaing
   - Lokasi RSD Nganjuk Cukup Strategis
   - RSD Terbesar Se-Kabupaten Nganjuk
   - Tarif yang Terjangkau
   - Pengembangan Pelayanan

b. RSD Kertosono

2.3.3. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Isu strategis pelayanan Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

- Peningkatan kapasitan Tenages dalam peningkatan pencapaian standart pelayanan minimal
- Persiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan integrasi layanan primer
- Pemenuhan sarpras yang sesuai standart

b. RSD Nganjuk

Peningkatan Pelayanan Dokter Spesialis/Sub Spesialis

1. Pengembangan Layanan Onkologi, Dokter Hematologi Onkologi
2. Pengembangan Pelayanan Jiwa
3. Klinik Eksekutif/Praktek Sore

Pemenuhan Sarana dan Prasarana

4. Persiapan Relokasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

	Rancangan Akhir RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
PAGU URUSAN KESEHATAN					**593.380.359.468**					**593.380.359.468**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	81	445.020.710.468	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	81	445.020.710.468	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	4 dokumen	**75.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	4 dokumen	**75.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dinkes	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dinkes	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	25.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dinkes	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dinkes	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	25.000.000	

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dinkes	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dinkes	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	25.000.000	
	Admimistrasi Keuangan Perangkat daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**161.395.380.000**	**Admimistrasi Keuangan Perangkat daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**161.395.380.000**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dinkes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1090 org/bl	86.868.339.976	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dinkes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1090 org/bl	86.868.339.976	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -RSD Nganjuk	rsd nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	651 org/bl	45.554.754.324	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -RSD Nganjuk	rsd nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	651 org/bl	45.554.754.324	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -RSD Kertosono	rsd kertosono	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	561 org/bl	28.972.285.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -RSD Kertosono	rsd kertosono	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	561 org/bl	28.972.285.700	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**250.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**250.000.000**	
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dinkes	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	250.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dinkes	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	250.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30 dokumen**	**250.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30 dokumen**	**250.000.000**	
8	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		0	

9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	dinkes	Jumlah orang yg mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 org	250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	dinkes	Jumlah orang yg mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 org	250.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**288 dokumen**	**1.075.048.850**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**288 dokumen**	**1.075.048.850**	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dinkes	Jumlah paket komponen instalasi loistrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dinkes	Jumlah paket komponen instalasi loistrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 paket	30.000.000	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dinkes	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	213.548.850	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dinkes	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	213.548.850	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	dinkes	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	12 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	dinkes	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	12 paket	50.000.000	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	dinkes	Tersedianya makanan dan minuman rapat,tamu dan harian pegawai	12 paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	dinkes	Tersedianya makanan dan minuman rapat,tamu dan harian pegawai	12 paket	300.000.000	
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	110 paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	110 paket	75.000.000	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dinkes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	55 dokumen	6.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dinkes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	55 dokumen	6.500.000	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dinkes	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dinkes	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 laporan	400.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**32 unit**	**1.816.129.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**32 unit**	**1.816.129.000**	
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinkes	Jumlah unit Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinkes	Jumlah unit Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	650.000.000	
19	Pengadaan Mebel	dinkes	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit	166.729.000	Pengadaan Mebel	dinkes	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit	166.729.000	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinkes	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakam	27 unit	999.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinkes	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakam	27 unit	999.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**737.759.940**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**737.759.940**	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.000.000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 laporan	400.000.000	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	332.759.940	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	332.759.940	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**91 unit**	**1.074.996.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**91 unit**	**1.074.996.000**	

25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinkes	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinkes	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	25.000.000	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinkes	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya	57 unit	509.996.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinkes	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya	57 unit	509.996.000	
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinkes	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinkes	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	40.000.000	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dinkes	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	1 unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dinkes	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	1 unit	500.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah unit yang telah ditingkatkan pelayanannya	22 unit	278.346.396.678	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah unit yang telah ditingkatkan pelayanannya	22 unit	278.346.396.678	
29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bagor	pusk bagor	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.199.824.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bagor	pusk bagor	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.199.824.000	
30	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baron	pusk baron.	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.917.732.368	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baron	pusk baron	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.917.732.368	
31	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Berbek	pusk berbek	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.024.988.840	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Berbek	pusk berbek	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.024.988.840	

32	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gondang	pusk gondang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.332.818.024	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gondang	pusk gondang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.332.818.024	
33	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jatikalen	pusk jatikalen	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1.283.400.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jatikalen	pusk jatikalen	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1.283.400.000	
34	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kertosono	pusk kertosono	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.166.280.208	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kertosono	pusk kertosono	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.166.280.208	
35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lengkong	pusk lengkong	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1.970.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lengkong	pusk lengkong	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1.970.000.000	
36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Loceret	pusk loceret	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.284.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Loceret	pusk loceret	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.284.000.000	
37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nganjuk	pusk nganjuk	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.541.300.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nganjuk	pusk nganjuk	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.541.300.000	
38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ngetos	pusk ngetos	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.616.720.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ngetos	pusk ngetos	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.616.720.000	
39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ngluyu	pusk ngluyu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1.288.719.300	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ngluyu	pusk ngluyu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1.288.719.300	

40	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nggronggot	pusk nggronggot	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.559.455.704	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nggronggot	pusk nggronggot	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.559.455.704	
41	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pace	pusk pace	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.378.225.500	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pace	pusk pace	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.378.225.500	
42	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Patianrowo	pusk patianrowo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.416.195.663	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Patianrowo	pusk patianrowo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.416.195.663	
43	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Prambon	pusk prambon	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.678.884.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Prambon	pusk prambon	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.678.884.000	
44	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rejoso	pusk rejoso	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.973.138.020	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rejoso	pusk rejoso	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.973.138.020	
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sawahan	pusk sawahan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.116.486.200	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sawahan	pusk sawahan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.116.486.200	
46	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sukomoro	pusk sukomoro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.584.383.996	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sukomoro	pusk sukomoro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.584.383.996	
47	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanjunganom	pusk tanjunganom	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	5.941.023.792	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanjunganom	pusk tanjunganom	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	5.941.023.792	

48	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wilangan	pusk wilangan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.472.821.063	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wilangan	pusk wilangan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.472.821.063	
49	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD – RSD Nganjuk	rsd nganjuk	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	87 Unit kerja	128.100.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD – RSD Nganjuk	rsd nganjuk	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	87 Unit kerja	128.100.000.000	
50	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD – RSD Kertosono	rsd kertosono	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	23 Unit	85.500.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD – RSD Kertosono	rsd kertosono	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	23 Unit	85.500.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Prosentase SPM yang memenuhi target**	**40 Persen**	145.270.909.000	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Prosentase SPM yang memenuhi target**	**40 Persen**	145.270.909.000	
			Prosentase Fasyankes terakreditasi	**70 Persen**				**Prosentase Fasyankes terakreditasi**	**70 Persen**		
			Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	**80 Persen**				**Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional**	**80 Persen**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase Fasyankes terakreditasi**	**70 Persen**	28.349.840.000	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase Fasyankes terakreditasi**	**70 Persen**	28.349.840.000	
52	Pembangunan Puskesmas	pusk Bagor	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	10.410.220.000	Pembangunan Puskesmas	pusk Bagor	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	10.410.220.000	

53	Pengembangan Puskesmas	IPAL Pusk loceret dan pesk pace	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alkes dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	1.000.000.000	Pengembangan Puskesmas	IPAL Pusk loceret dan pesk pace	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alkes dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	1.000.000.000	
54	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	pemeliharaan IPAL Nganjuk, Swahan, Gondang, Rejoso, Lengkong, Ngluyu, Sukomoro, Baron, T.nom, Prambon, Ngronggot, Wilangan, Patianrowo,, Berbek,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alkes yg telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeiharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	14 unit	1.649.620.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	pemeliharaan IPAL Nganjuk, Swahan, Gondang, Rejoso, Lengkong, Ngluyu, Sukomoro, Baron, T.nom, Prambon, Ngronggot, Wilangan, Patianrowo,, Berbek,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alkes yg telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeiharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	14 unit	1.649.620.000	
55	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 jenis alkes	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Alat Kesehatan Lainnya	14 unit	2.000.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 jenis alkes	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Alat Kesehatan Lainnya	14 unit	2.000.000.000	

56	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai, obat, dan vaksin yang Disediakan	32 paket	13.000.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai, obat, dan vaksin yang Disediakan	32 paket	13.000.000.000	
59	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinkes	puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara sesuai Standar	438 unit	250.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinkes	puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara sesuai Standar	438 unit	250.000.000	
61	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan	puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.	1 paket	15.000.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan	puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.	1 paket	15.000.000	
63	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	dinkes	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	12.000 Keluarga	25.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	dinkes	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	12.000 Keluarga	25.000.000	
64	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase SPM yang memenuhi target**	**100 Persen**	115.779.069.000	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase SPM yang memenuhi target**	**100 Persen**	115.779.069.000	
65			**Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional**	**80 Persen**				**Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional**	**80 Persen**		

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinkes	dinkes	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.016 Orang	850.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinkes	dinkes	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.016 Orang	850.000.000	
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dinkes	dinkes	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.572 Orang	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dinkes	dinkes	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.572 Orang	100.000.000	
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dinkes	dinkes	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.334 Orang	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dinkes	dinkes	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.334 Orang	100.000.000	
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dinkes	dinkes	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	56.186 Orang	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dinkes	dinkes	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	56.186 Orang	100.000.000	
68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dinkes	dinkes	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	124.488 Orang	120.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dinkes	dinkes	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	124.488 Orang	120.000.000	
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif Puskesmas dinkes	dinkes	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	720.067 Orang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif Puskesmas dinkes	dinkes	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	720.067 Orang	50.000.000	
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dinkes	dinkes	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	197.834 Orang	400.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dinkes	dinkes	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	197.834 Orang	400.000.000	

71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi dinkes	dinkes	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	407.300 Orang	150.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi dinkes	dinkes	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	407.300 Orang	150.000.000	
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus dinkes	dinkes	Jumlah penderita diabeteus melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.718 Orang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus dinkes	dinkes	Jumlah penderita diabeteus melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.718 Orang	50.000.000	
73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dinkes	dinkes	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan iwa berat sesuai standar	2.163 Orang	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dinkes	dinkes	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan iwa berat sesuai standar	2.163 Orang	200.000.000	
74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dinkes	dinkes	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	10.594 Orang	120.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dinkes	dinkes	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	10.594 Orang	120.000.000	
75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV dinkes	dinkes	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	20.090 Orang	550.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV dinkes	dinkes	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	20.090 Orang	550.000.000	
76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai Standar	5 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai Standar	5 Dokumen	20.000.000	

77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayana Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana Sesuai Standart	2 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayana Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana Sesuai Standart	2 Dokumen	10.000.000	
78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	550.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	550.000.000	
79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	75.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	75.000.000	
80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	200.000.000	
81	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	25.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	25.000.000	
82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	80.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	80.000.000	
83	Pengelolaan Surveilans Kesehatan dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20 Dokumen	100.000.000	
84	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	dinkes	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	226.278 Orang	25.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	dinkes	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	226.278 Orang	25.000.000	

85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dinkes	dinkes	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43 Orang	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dinkes	dinkes	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43 Orang	30.000.000	
86	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 Dokumen	35.000.000	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 Dokumen	35.000.000	
87	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	1.531.869.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	1.531.869.000	
88	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	90.000.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	90.000.000.000	
89	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dinkes	dinkes	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang didistribusikan	20 Paket	55.000.000	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dinkes	dinkes	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang didistribusikan	20 Paket	55.000.000	
90	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dinkes	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 Dokumen	300.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dinkes	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 Dokumen	300.000.000	
91	Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	dinkes	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	24 Unit	20.000.000	Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	dinkes	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	24 Unit	20.000.000	

92	Operasional Pelayanan Puskesmas Bagor	pusk bagor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	800.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Bagor	pusk bagor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	800.000.000	
93	Operasional Pelayanan Puskesmas Baron	pusk baron	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	750.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Baron	pusk baron	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	750.000.000	
94	Operasional Pelayanan Puskesmas Berbek	pusk berbek	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	840.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Berbek	pusk berbek	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	840.000.000	
95	Operasional Pelayanan Puskesmas Gondang	pusk gondang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	875.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Gondang	pusk gondang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	875.000.000	
96	Operasional Pelayanan Puskesmas Jatikalen	pusk jatikalen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	995.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Jatikalen	pusk jatikalen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	995.000.000	
97	Operasional Pelayanan Puskesmas Kertosono	pusk kertosono	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	665.200.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Kertosono	pusk kertosono	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	665.200.000	
98	Operasional Pelayanan Puskesmas Lengkong	pusk lengkong	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	975.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Lengkong	pusk lengkong	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	975.000.000	
99	Operasional Pelayanan Puskesmas Loceret	pusk loceret	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	764.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Loceret	pusk loceret	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	764.000.000	
100	Operasional Pelayanan Puskesmas Nganjuk	pusk nganjuk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	843.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Nganjuk	pusk nganjuk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	843.000.000	
101	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngetos	pusk ngetos	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	767.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngetos	pusk ngetos	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	767.000.000	
102	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngluyu	pusk ngluyu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.180.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngluyu	pusk ngluyu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.180.000.000	

103	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngronggot	pusk ngronggot	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	798.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngronggot	pusk ngronggot	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	798.000.000	
104	Operasional Pelayanan Puskesmas Pace	pusk pace	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	902.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Pace	pusk pace	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	902.000.000	
105	Operasional Pelayanan Puskesmas Patianrowo	pusk patianrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	835.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Patianrowo	pusk patianrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	835.000.000	
106	Operasional Pelayanan Puskesmas Prambon	pusk prambon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	932.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Prambon	pusk prambon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	932.000.000	
107	Operasional Pelayanan Puskesmas Rejoso	pusk rejoso	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.305.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Rejoso	pusk rejoso	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.305.000.000	
108	Operasional Pelayanan Puskesmas Sawahan	pusk sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	998.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Sawahan	pusk sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	998.000.000	
109	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukomoro	pusk sukomoro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	964.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukomoro	pusk sukomoro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	964.000.000	
110	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjunganom	pusk tanjunganom	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	789.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjunganom	pusk tanjunganom	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	789.000.000	
111	Operasional Pelayanan Puskesmas Wilangan	pusk wilangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.150.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Wilangan	pusk wilangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.150.000.000	
112	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	upt labkesda dan IFK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	120 dokumen	950.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	upt labkesda dan IFK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	120 dokumen	950.000.000	
113	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	dinkes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kab/Kota	55 Unit	65.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	dinkes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kab/Kota	55 Unit	65.000.000	

114	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	dinkes	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	260.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	dinkes	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	260.000.000	
115	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon Wabah dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	48 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon Wabah dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	48 Dokumen	15.000.000	
116	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	dinkes	Jumlah PSC 119 Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan RS dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu	1 Unit	250.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	dinkes	Jumlah PSC 119 Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan RS dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu	1 Unit	250.000.000	
117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	dinkes	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai standar	2.180 Orang	110.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	dinkes	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai standar	2.180 Orang	110.000.000	
119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	dinkes	Jumlah orang denganHIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	316 Orang	110.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	dinkes	Jumlah orang denganHIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	316 Orang	110.000.000	
120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	dinkes	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	8 Orang	15.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	dinkes	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	8 Orang	15.000.000	
121	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	dinkes	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1.036 Tatanan	30.000.000	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	dinkes	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1.036 Tatanan	30.000.000	

122	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		**Prosentase SPM yang memenuhi target**	**100 Persen**	275.000.000	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		**Prosentase SPM yang memenuhi target**	**100 Persen**	275.000.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7 Dokumen	275.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7 Dokumen	275.000.000	
123	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase Fasyankes terakreditasi**	**100 Persen**	867.000.000	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase Fasyankes terakreditasi**	**100 Persen**	867.000.000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	dinkes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	55 Unit	507.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	dinkes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	55 Unit	507.000.000	
124	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4 Dokumen	360.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4 Dokumen	360.000.000	
125	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Prosentase tenakes yang memenuhi standar**	**100 Persen**	810.000.000	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Prosentase tenakes yang memenuhi standar**	**100 Persen**	810.000.000	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Surat Ijin Praktik tenaga kesehatan**	**1200 Dokumen**	15.000.000	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Surat Ijin Praktik tenaga kesehatan**	**1200 Dokumen**	15.000.000	

	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	1200 Dokumen	15.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	1200 Dokumen	15.000.000	
135	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen hasil perencanaan,pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan**	8 Dokumen	55.000.000	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen hasil perencanaan,pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan**	8 Dokumen	55.000.000	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya manusia Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	15.000.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya manusia Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	15.000.000	
126	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	40.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	40.000.000	
127	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya**	**250 Orang**	740.000.000	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya**	**250 Orang**	740.000.000	

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dinkes	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 Orang	740.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dinkes	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 Orang	740.000.000	
128	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi**	**100 Persen**	500.000.000	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi**	**100 Persen**	500.000.000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		**Prosentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100 Persen**	195.000.000	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		**Prosentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100 Persen**	195.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	68 Dokumen	195.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	68 Dokumen	195.000.000	

129	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**54 Dokumen**	150.000.000	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**54 Dokumen**	150.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dinkes	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	54 Dokumen	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dinkes	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	54 Dokumen	150.000.000	

13 1	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM**	**8 dokumen**	70.000.000	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM**	**8 dokumen**	70.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dinkes	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 dokumen	70.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dinkes	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 dokumen	70.000.000	

132	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		**Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan**	**54 Unit**	85.000.000	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		**Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan**	**54 Unit**	85.000.000	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	dinkes	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	54 Unit	85.000.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	dinkes	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	54 Unit	85.000.000	
133	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Indeks Keluarga Sehat**	**0,5**	1.778.740.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Indeks Keluarga Sehat**	**0,5**	1.778.740.000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**4 Dokumen**	350.000.000	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**4 Dokumen**	350.000.000	

	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dinkes	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	350.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dinkes	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	350.000.000	
134	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase keluarga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat**	**55 Persen**	425.000.000	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase keluarga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat**	**55 Persen**	425.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	400.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	400.000.000	
135	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dinkes	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	72.140 keluarga	25.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dinkes	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	72.140 keluarga	25.000.000	
136	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**4 Dokumen**	1.003.740.000	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**4 Dokumen**	1.003.740.000	

	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	1.003.740.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	1.003.740.000	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 mengangkat tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Azazi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaran Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemnerantasan Kemiskian
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan" dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Umur Harapan hidup	72,5
	Universal Health Coverage	80

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **""Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Nganjuk.
2. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan Kabupaten Nganjuk lainnya.
3. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kabupaten Nganjuk di berbagai bidang.

4. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kabupaten Nganjuk.
5. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kabupaten Nganjuk.
6. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan...

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi 2025 (Rp.)
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	593.380.359.468

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Alokasi 2025 (Rp)
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Umur Harapan Hidup	72,5	593.380.359.468
		Universal Health Coverage	80	

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

Rancangan Akhir RKPD					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAGU URUSAN KESEHATAN (DINKES, 2 RS , 20 PUSKESMAS)					**593.380.359.468**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	81	445.020.710.468
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,**	4 dokumen	**75.000.000**

	Perangkat Daerah		**dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dinkes	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	25.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dinkes	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	25.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dinkes	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	25.000.000
	Admimistrasi Keuangan Perangkat daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**161.395.380.000**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dinkes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1090 org/bl	86.868.339.976
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -RSD Nganjuk	rsd nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	651 org/bl	45.554.754.324
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -RSD Kertosono	rsd kertosono	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	561 org/bl	28.972.285.700
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**250.000.000**

7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dinkes	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	250.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30 dokumen**	**250.000.000**
8	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		0
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	dinkes	Jumlah orang yg mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 org	250.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**288 dokumen**	**1.075.048.850**
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dinkes	Jumlah paket komponen instalasi loistrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 paket	30.000.000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dinkes	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	213.548.850
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	dinkes	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	12 paket	50.000.000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	dinkes	Tersedianya makanan dan minuman rapat,tamu dan harian pegawai	12 paket	300.000.000
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	110 paket	75.000.000

			yang tersedia		
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dinkes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	55 dokumen	6.500.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dinkes	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 laporan	400.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**32 unit**	**1.816.129.000**
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinkes	Jumlah unit Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	650.000.000
19	Pengadaan Mebel	dinkes	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit	166.729.000
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinkes	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakam	27 unit	999.400.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**737.759.940**
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.000.000
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 laporan	400.000.000
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	332.759.940

			yang Disediakan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**91 unit**	**1.074.996.000**
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinkes	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	25.000.000
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinkes	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya	57 unit	509.996.000
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinkes	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	40.000.000
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dinkes	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	1 unit	500.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah unit yang telah ditingkatkan pelayanannya	22 unit	278.346.396.678
29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bagor	pusk bagor	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.199.824.000
30	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baron	pusk baron	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan	1 unit kerja	2.917.732.368

			penunjang pelayanan		
31	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Berbek	pusk berbek	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.024.988.840
32	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gondang	pusk gondang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.332.818.024
33	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jatikalen	pusk jatikalen	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1.283.400.000
34	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kertosono	pusk kertosono	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.166.280.208
35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lengkong	pusk lengkong	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1.970.000.000
36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Loceret	pusk loceret	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.284.000.000
37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nganjuk	pusk nganjuk	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.541.300.000
38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ngetos	pusk ngetos	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.616.720.000
39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	pusk ngluyu	Jumlah BLUD yang menyediakan	1 unit kerja	1.288.719.300

	Ngluyu		pelayanan dan penunjang pelayanan		
40	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nggronggot	pusk nggronggot	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.559.455.704
41	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pace	pusk pace	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.378.225.500
42	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Patianrowo	pusk patianrowo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.416.195.663
43	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Prambon	pusk prambon	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	4.678.884.000
44	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rejoso	pusk rejoso	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.973.138.020
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sawahan	pusk sawahan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.116.486.200
46	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sukomoro	pusk sukomoro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	2.584.383.996
47	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanjunganom	pusk tanjunganom	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	5.941.023.792
48	Pelayanan dan Penunjang	pusk wilangan	Jumlah BLUD yang	1 unit kerja	2.472.821.0

	Pelayanan BLUD Wilangan		menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		63
49	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD – RSD Nganjuk	rsd nganjuk	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	87 Unit kerja	128.100.000.000
50	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD – RSD Kertosono	rsd kertosono	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	23 Unit	85.500.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Prosentase SPM yang memenuhi target**	**40 Persen**	145.270.909.000
			Prosentase Fasyankes terakreditasi	**70 Persen**	
			Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	**80 Persen**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase Fasyankes terakreditasi**	**70 Persen**	28.349.840.000
52	Pembangunan Puskesmas	pusk Bagor	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	10.410.220.000
53	Pengembangan Puskesmas	IPAL Pusk loceret dan pesk pace	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alkes dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	1.000.000.000

56	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	pemeliharaan IPAL Nganjuk, Swahan, Gondang, Rejoso, Lengkong, Ngluyu, Sukomoro, Baron, T.nom, Prambon, Ngronggot, Wilangan, Patianrowo,, Berbek,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alkes yg telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeiharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	14 unit	1.649.620.000
59	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 jenis alkes	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Alat Kesehatan Lainnya	14 unit	2.000.000.000
61	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai, obat, dan vaksin yang Disediakan	32 paket	13.000.000.000
63	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinkes	puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara sesuai Standar	438 unit	250.000.000
64	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta	puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke	1 paket	15.000.000

	Fasilitas Kesehatan		Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.		
65	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	dinkes	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	12.000 Keluarga	25.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase SPM yang memenuhi target**	**100 Persen**	115.779.069.000
			Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	**80 Persen**	
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinkes	dinkes	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.016 Orang	850.000.000
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dinkes	dinkes	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.572 Orang	100.000.000
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dinkes	dinkes	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	12.334 Orang	100.000.000
68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dinkes	dinkes	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	56.186 Orang	100.000.000
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	dinkes	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	124.488 Orang	120.000.000

	Dasar dinkes		Pelayanan Kesehatan sesuai Standar		
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif Puskesmas dinkes	dinkes	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	720.067 Orang	50.000.000
71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dinkes	dinkes	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	197.834 Orang	400.000.000
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi dinkes	dinkes	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	407.300 Orang	150.000.000
73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus dinkes	dinkes	Jumlah penderita diabeteus melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.718 Orang	50.000.000
74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dinkes	dinkes	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan iwa berat sesuai standar	2.163 Orang	200.000.000
75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dinkes	dinkes	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	10.594 Orang	120.000.000
76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	dinkes	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	20.090 Orang	550.000.000

	dinkes		Pelayanan sesuai Standar		
77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai Standar	5 Dokumen	20.000.000
78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayana Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana Sesuai Standart	2 Dokumen	10.000.000
79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	550.000.000
80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	75.000.000
81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	200.000.000
82	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	25.000.000
83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi	3 Dokumen	80.000.000

	Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Kesehatan		
84	Pengelolaan Surveilans Kesehatan dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20 Dokumen	100.000.000
85	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	dinkes	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	226.278 Orang	25.000.000
86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dinkes	dinkes	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43 Orang	30.000.000
87	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 Dokumen	35.000.000
88	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	1.531.869.000
89	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	90.000.000.000
90	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dinkes	dinkes	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang didistribusikan	20 Paket	55.000.000

91	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dinkes	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 Dokumen	300.000.000
92	Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	dinkes	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	24 Unit	20.000.000
93	Operasional Pelayanan Puskesmas Bagor	pusk bagor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	800.000.000
94	Operasional Pelayanan Puskesmas Baron	pusk baron	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	750.000.000
95	Operasional Pelayanan Puskesmas Berbek	pusk berbek	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	840.000.000
96	Operasional Pelayanan Puskesmas Gondang	pusk gondang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	875.000.000
97	Operasional Pelayanan Puskesmas Jatikalen	pusk jatikalen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	995.000.000
98	Operasional Pelayanan Puskesmas Kertosono	pusk kertosono	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	665.200.000
99	Operasional Pelayanan Puskesmas	pusk lengkong	Jumlah Dokumen Operasional	12 dokumen	975.000.000

	Lengkong		Pelayanan Puskesmas		
100	Operasional Pelayanan Puskesmas Loceret	pusk loceret	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	764.000.000
101	Operasional Pelayanan Puskesmas Nganjuk	pusk nganjuk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	843.000.000
102	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngetos	pusk ngetos	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	767.000.000
103	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngluyu	pusk ngluyu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.180.000.000
104	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngronggot	pusk ngronggot	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	798.000.000
105	Operasional Pelayanan Puskesmas Pace	pusk pace	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	902.000.000
106	Operasional Pelayanan Puskesmas Patianrowo	pusk patianrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	835.000.000
107	Operasional Pelayanan Puskesmas Prambon	pusk prambon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	932.000.000
108	Operasional Pelayanan Puskesmas Rejoso	pusk rejoso	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.305.000.000
109	Operasional Pelayanan Puskesmas Sawahan	pusk sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	998.000.000
11	Operasional	pusk	Jumlah	12	964.000.00

0	Pelayanan Puskesmas Sukomoro	sukomoro	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	0
111	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjunganom	pusk tanjunganom	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	789.000.000
112	Operasional Pelayanan Puskesmas Wilangan	pusk wilangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.150.000.000
113	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	upt labkesda dan IFK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	120 dokumen	950.000.000
114	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	dinkes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kab/Kota	55 Unit	65.000.000
115	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	dinkes	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	260.000.000
116	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon Wabah dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	48 Dokumen	15.000.000
117	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	dinkes	Jumlah PSC 119 Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan RS dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu	1 Unit	250.000.000
119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	dinkes	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	2.180 Orang	110.000.000

	dengan Tuberkulosis		yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai standar		
120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	dinkes	Jumlah orang denganHIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	316 Orang	110.000.000
121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	dinkes	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	8 Orang	15.000.000
122	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	dinkes	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1.036 Tatanan	30.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		**Prosentase SPM yang memenuhi target**	**100 Persen**	275.000.000
123	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7 Dokumen	275.000.000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase Fasyankes terakreditasi**	**100 Persen**	867.000.000
124	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	dinkes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	55 Unit	507.000.000
125	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan	4 Dokumen	360.000.000

	Kesehatan Rujukan		Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**Prosentase tenakes yang memenuhi standar**	**100 Persen**	810.000.000
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Surat Ijin Praktik tenaga kesehatan**	**1200 Dokumen**	15.000.000
135	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	1200 Dokumen	15.000.000
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen hasil perencanaan,pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan**	8 Dokumen	55.000.000
126	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya manusia Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	15.000.000
127	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	40.000.000

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya**	**250 Orang**	740.000.000
128	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dinkes	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 Orang	740.000.000
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		**Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi**	**100 Persen**	500.000.000
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		**Prosentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100 Persen**	195.000.000
129	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	68 Dokumen	195.000.000

	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**54 Dokumen**	150.000.000
131	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dinkes	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	54 Dokumen	150.000.000
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi**	**8 dokumen**	70.000.000

			Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM		
132	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dinkes	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 dokumen	70.000.000
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		**Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan**	**54 Unit**	85.000.000
133	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	dinkes	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	54 Unit	85.000.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**Indeks Keluarga Sehat**	**0,5**	1.778.740.000
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**4 Dokumen**	350.000.000
134	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dinkes	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	350.000.000
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase keluarga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat**	**55 Persen**	425.000.000
135	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	400.000.000
136	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dinkes	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	72.140 keluarga	25.000.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya		**Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya**	**4 Dokumen**	1.003.740.000

	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**		
137	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dinkes	dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	1.003.740.000

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan ibu hamil KEK oleh kader dalam pencegahan stunting		Rp 119.477.000		BK Prop
		Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat		Rp 30.000.000		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan tahunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nganjuk, 05 AUG 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS KESEHATAN

dr. Hendriyanto, M.K.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19691108 200312 1 004